

BAB V

KESIMPULAN

Pada Bab 5 merupakan penutup, meliputi kesimpulan dan sumbang saran atau rekomendasi.

Didalam Konvensi Kerangka Kerja PBB Tentang Perubahan Iklim atau UNFCCC yang disepakati di Rio de Janeiro, Brazil pada tahun 1992 yang menghasilkan Protokol Kyoto sebagai tata cara penurunan emisi gas. China termasuk kedalam kelompok negara-negara berkembang yang tidak berkewajiban dalam penurunan emisi gas atau Non Annex I.

China merupakan negara dengan kegiatan industrialisasi yang sangat besar sebagai penyokong utama pertumbuhan perekonomian Negara Tirai Bambu tersebut. Dimulai sejak tahun 2003, China mengembangkan industri dengan cara mulai terbuka terhadap investasi asing dan kepemilikan modal sebesar 100 persen. Penjualan Negara Tirai Bambu tersebut bertambah 17 hingga 42,7 persen dari lima juta yuan sampai 4,104,5 miliar yuan dan menghasilkan keuntungan sebesar 815,2 miliar yuan.

Akibat dari kegiatan industrialisasi besar-besaran yang dilakukan oleh pemerintah China dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, China menjadi negara dengan penghasil emisi gas karbon terbesar di dunia dan menggeser posisi Amerika Serikat. Berdasarkan data statistika pada tahun 2016, total emisi gas yang dihasilkan China mencapai 28,21 persen dari total emisi gas dunia, sedangkan Amerika Serikat 15,99 persen.

Emisi gas karbon ini tentu saja memberikan dampak buruk bagi bumi, seperti pemanasan global dan perubahan iklim. Hal ini membuat dunia internasional menuntut China agar membuat kebijakan yang berkaitan dengan perubahan iklim dan pemanasan global, terutama China merupakan negara emitor terbesar. Dalam merespon tuntutan dari dunia internasional mengenai kerusakan lingkungan yang telah disebabkan oleh

negara Tirai Bambu tersebut, China telah melakukan usaha-usaha untuk mengatasi masalah ini baik domestik maupun internasional.

Kebijakan utama perekonomian China yang terkait dengan emisi gas yaitu *China's Five Year Plans* bertujuan untuk mengurangi intensitas energi per unit produk domestik bruto atau PDB. Kebijakan *China's Five Year Plans* ke-12 yang diadopsi pemerintah China pada Maret 2011 berkonsentrasi pada energi dan perubahan iklim serta menetapkan target dan kebijakan untuk tahun 2011-2015.

Namun kebijakan *China's Five Year Plans* ke 12 ini merupakan target yang sesuai dengan status quo, dan juga merupakan langkah yang lebih dramatis untuk mengurangi konsumsi energi fosil, mempromosikan sumber energi rendah karbon dan merekonstruksi perekonomian China.

Kebijakan *China's Five Year Plans* ke 12 ini diprediksi akan membuat China menolak segala keputusan yang dibuat dalam COP setelah masa kebijakan ini selesai atau setelah tahun 2020. Sehingga dalam COP, China akan tetap kepada keputusannya dan akan menyetujui keputusan-keputusan yang akan dihasilkan dengan syarat tertentu.

Intensitas energi, karbon dan target energi non fosil cenderung akan terus berlanjut. Namun meningkat atau menurunnya akan bergantung pada seberapa mudah China mencapai target *12th Five Year Plan*. Terutama perekonomian China saat ini dengan besarnya pangsa batubara sebagai energi utama, karena China memiliki cadangan batubara jauh lebih besar dibanding minyak dan gas.

Kebutuhan domestik China dalam membangun pertumbuhan dan stabilitas perekonomian merupakan salah satu faktor yang membuat China kurang kooperatif terhadap komitmen dalam perjanjian internasional. China telah kehilangan kepercayaan terhadap efektivitas UNFCCC dan

China juga berpendapat bahwa Protokol Kyoto seharusnya dibentuk untuk mengikat komitmen negara-negara maju dalam mengurangi emisi gas, karena China bertahan pada posisinya sebagai negara berkembang yang tidak terikat serta memiliki kewajiban dalam penurunan emisi gas.

Faktor kepentingan nasional China sebagai dasar pembuatan kebijakan perubahan iklim bukan merupakan hal yang baru. Kebutuhan dalam negeri akan selalu menjadi dasar Negara Tirai Bambu mengenai perubahan iklim dalam dunia internasional. Keinginan China untuk mengimpor gas alam terus meningkat dratis, sementara permintaan energi batubara tidak mungkin menurun dalam waktu pendek dan bahkan akan terus meningkat.

Kunci utama dalam memahami kebijakan perubahan iklim di China tidak hanya dilihat dari kepentingan aktor utama dalam hal ini negara, tetapi seluruh aktor yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan. Prioritas utama pemerintah China saat ini adalah pertumbuhan ekonomi. Sehingga segala kebijakan yang terkait mengenai lingkungan akan terbentur dengan pembangunan ekonomi.

Pemerintah China dalam menyikapi tuntutan dari dunia internasional menyatakan prinsip *Common But Differentiated Responsibilities*, yang berarti negara berkembang menurunkan emisi gas secara sukarela dan bukan kewajiban yang mengikat. Prinsip tersebut juga disampaikan pemerintah China dalam konferensi yang baru-baru ini diadakan terkait menindaklanjuti permasalahan lingkungan terkait emisi gas guna menekan perubahan iklim dan pemanasan global adalah COP ke 21 yang diadakan di Paris pada tahun 2015.

Dalam dokumen yang diajukan pemerintah China ke PBB, pemerintah China menyatakan bahwa hasil negosiasi harus memperhitungkan tanggung jawab sejarah karena menilai negara-negara maju telah memempatkan lebih banyak emisi gas

karbon di atmosfer dibanding negara-negara berkembang pada saat ratifikasi Protokol Kyoto.

China merupakan negara berkembang yang telah berevolusi menjadi negara industri dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. China telah menjadi salah satu raksasa perekonomian dunia yang sangat berpengaruh dalam dunia internasional. Pertumbuhan ekonomi China yang sangat pesat sejalan dengan dampak yang ditimbulkan akibat industri China yang merupakan penyokong pertumbuhan perekonomian China.

China memang dikategorikan sebagai negara berkembang yang tidak memiliki kewajiban untuk mengurangi emisi gas, tetapi dalam konteks ini China adalah negara penghasil emisi gas terbesar di dunia. Sebagai emitor terbesar China seharusnya mengambil tindakan dari gas yang dihasilkan industri negaranya. Karena tidak hanya berdampak buruk terhadap China saja, tetapi seluruh dunia.

Penulis merasa jika prinsip China yang menyatakan *Common But Differentiated Responsibilities* memang sudah tepat. Dunia internasional seharusnya tidak hanya menekan China untuk bertanggung jawab, karena secara historis negara-negara maju lain telah menghasilkan emisi gas yang sangat besar pula. Sehingga tanggung jawab dalam menyelesaikan masalah ini tidak hanya untuk China saja tetapi juga seluruh negara yang secara historis menghasilkan emisi gas yang besar beserta negara-negara lain dapat turut mambantu menyelesaikan masalah ini.